



Bulan:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun:

2	0	2	4
---	---	---	---

tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Media:	Radar Sampit	Halaman:
Kompas Elektronik	Kalteng Pos	Borneo News
	Palangka Post	Tabengan

Tingkatkan Disiplin Pengelolaan Anggaran

SAMPIT-Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengingatkan, sekaligus meminta kepada pemerintah kabupaten setempat, agar lebih meningkatkan disiplin dalam pengelolaan anggaran daerah.



RINIE ANDERSON

“Mengacu pada realisasi tahun anggaran 2023 lalu, kami berharap pada 2024

yang tak capai target, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan

daerah lebih memperhatikan disiplin anggaran,” kata juru bicara fraksi PDIP Perjuangan, Rinie Anderson.

Diuraikannya, hal itu belajar dari pengalaman di APBD 2023 silam, bahwa realisasi pendapatan dan belanja daerah

Anggaran (Silpa) terlalu besar.

Realisasi pendapatan daerah Kotim pada tahun 2023 sebesar Rp2.100.930.078.345 hanya mencapai 91,44 persen dari target Rp2.297.523.592.136. Menurut Rinie, di antaranya disebabkan pendapatan asli daerah (PAD) yang hanya Rp374.879.069.055 atau 69,67 persen dari target sebesar Rp538.077.621.136.

“Hal ini perlu dicari permasalahannya untuk diupayakan solusinya, mengingat masih besarnya peluang pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan

lainnya di Kotim,” tegas Rinie.

Kemudian, realisasi belanja daerah Kotim tahun 2023 hanya sebesar 83,82 persen atau Rp2.060.149.352.101 dari target Rp2.457.932.557.380. Artinya lanjut Rinie, anggaran belanja yang tidak terserap sebesar 16,18 persen atau Rp397 miliar lebih.

Dikatakannya pula, penyerapan anggaran belanja daerah tersebut tergolong masih kurang maksimal, sehingga ada beberapa program kegiatan yang belum terlaksana. Oleh sebab itu tegas Rinie, Fraksi PDIP mendorong Pemkab Kotim agar pada 2024 ini dan seterusnya

lebih memperhatikan disiplin anggaran untuk melaksanakan program kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan dalam APBD.

“Sekali lagi kami berharap hal ini bisa menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terkait agar meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, sehingga program yang direncanakan bisa dilaksanakan, utamanya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Rinie. **(ang/gus)**